DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur :

Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk

AP Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia,* Maju Mandar, Bandung

Bachtiar Effendie, 1983, *Pendaftaraan Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya,* Alumni, Bandung

Boedi Harsono, 1982, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah,* Djambatan, Jakarta

_____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan, Jakarta

Eko Yulian Isnur, 2009, *Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Harun Al.Rasyid, 1985, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola Surabaya

Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah,* Cet.2, Jakarta Kencana, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta

Wjs Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* PN Balai Pustaka, Jakarta

B. Seminar / Makalah

1. Abdurrahman, *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Rangka Hamkamnas,* prasaran pada Seminar Hukum Pertanahan, HKTI, 23 Januari 1978, Jakarta
2. M. Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, (Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU*)

3. Proyek Pembinaan Hukum dan Pengembangan Hukum Biro Hukum Prop.DIY, 1984, *Latar Belakang diberlakukan sepenuhnya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta*

C. Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960)
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 1954 tentang penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh perusahaan pertanian asing
5. Layang Undang-Undang (Rijksblad) Kasultanan No. 24 Tahun 1925 tentang *Pranatan Bab Pajeg Perpondeng Tumrap Wong Bumi Ing Kasultanan Ngayogyakarta*

D. Sumber dari Internet :

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, *Geografis*, dalam http//www.kulonprogokab.go.id

E. Wawancara :

1. Bapak Drs. Yusuf Bambang Sulistiyono sebagai Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
2. Bapak Harijanto,ST sebagai Kasubsi Survei Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
3. Ibu Isnarti SIP sebagai Sekertaris Desa Kelurahan Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo